

**PENGARUH TINGKAT KEMAKMURAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI



Nama : Mellyana Adelia
Nim : 222018174

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH TINGKAT KEMAKMURAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Mellyana Adelia
Nim : 222018174

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

Fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas muhammadiyah Palembang
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Tingkat Kemakmuran dan Belanja Modal
Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.
Nama : Mellyana Adelia
Nim : 222018174
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima Dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing I



Dr. Drs Sunardi, S.E., M.Si.,
NIDN. 0206046303

Pembimbing II



Darmayanti, S.E., M.M
NIDN. 0219057901

Mengetahui
Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Befri, S.E., Ak, CA., Dr
NIDN. 0216106902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mellyana Adelia

Nim : 222018174

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Public

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kemakmuran Dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan :

1. sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendirian tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima.

Palembang,
Yang Menyatakan



Mellyana Adelia

222018174

Motto dan Persembahan

Bersabarlah disetiap proses mu.

Yakinlah akan ada pelangi yang akan menanti disetiap perjuanganmu.

Percayalah Allah akan selalu menolongmu.

Orang sukses itu akan merasakan segalanya tanpa terkecuali, maka dari orang sukses pun tidak ada prosesnya yang mulus seperti yang diharapkan. Maka bersabarlah dan bedoa dan berusaha. **Anak tunggal tidak ada kata menyerah, anak tunggal harus kuat, anak tunggal harus sukses dan membuktikan kesemua orang bahwa saya pasti bisa. “tetap semangat maju terus berproses jangan dengarkan kata orang lain, fokus kedepan bekerja dan raih cita-cita setinggi mungkin.**

(Mellyana Adelia)

Alhamdulillah, dengan penuh cinta, dan Ridho Allah SWT.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Dosen Pembimbing I dan II Bapak Dr. Drs Sunardi, S.E.,M,Si., dan Ibu Darmayanti, S.E.,M,M.
- ❖ Kedua Orang Tua ku Ayah Sumeri dan Ibu Dewi Andriani Tercinta dan Tersayang
- ❖ Diriku Sendiri Yang Kuat dan Hebat
- ❖ Paman ku Andy Wijaya dan Iwan Kurniawan
- ❖ Sepupu-sepupu ku tante ku
- ❖ Seluruh Keluarga Besarku
- ❖ Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“pengaruh tingkat kemakmuran dan belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (guna) meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orang tua Ayahanda saya bapak Sumeri dan Ibunda saya Dewi Andriani serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak DR. Drs Sunardi, S.E., M.,Si., dan ibu Darmayanti, S.E.,M,M yang telah membimbing dan memberi masukan guna menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, bapak dan ibuku ialah bapak Sumeri dan Ibu Dewi Andriani. Pamanku Andi Wijaya, Iwan Kurniawan, Bambang Prakasa, dan sepupu-sepupu ku tercinta yang selalu mensupport saya selama ini.
8. Sahabat-sahabatku terbaik dan tercinta yang telah kebersamai dan memberikan motivasi dalam segala hal sejak awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2018 yang telah bekerjasama menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2022

Mellyana Adelia

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
HALAMAN ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka	12
B. Penelitian Sebelumnya	17
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Hipotesis	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26

C. Operasionalisasi Variabel	26
D. Populasi Dan Sampel.....	27
E. Data Yang Diperlukan	29
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Data Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi	5
Tabel II.1 Penelitian sebelumnya	24
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	28
Tabel III.2 Prosedur Penarikan Sampel	30
Tabel IV.1 Gambaran Hasil Penelitian	45
Tabel IV.2 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif	48
Tabel IV.3 Uji Multikolinieritas	50
Tabel IV.4 Uji Autokorelasi.....	52
Tabel IV.5 Uji F (Simultan).....	53
Tabel IV.6 Uji t (Parsial).....	54
Tabel IV.7 Analisis Regresi Linier Berganda	55
Tabel IV.7 Analisis Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar IV.1 Uji Normalitas.....	49
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas.....	51

ABSTRAK

Mellyana Adelia, 2022, “Pengaruh Tingkat Kemakmuran Dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Jambi”.

Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Drs. Sunardi, S.E,M.Si dan Pembimbing II Darmayanti, S.E., M,M.

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemakmuran dan belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder. penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 22. Hasil Penelitian menunjukkan persamaan regresi linier $Y = 37,009 - 1,4889X_1 + 6,585X_2$, bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat kemakmuran dan belanja modal secara simultan terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi karena dalam uji F hitung $\text{sig } 0,095 > 0,05$, selanjutnya tidak ada pengaruh secara parsial tingkat kemakmuran terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi karena pada uji T nilai $\text{sig } 0,500 > 0,05$, dan terdapat pengaruh belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan dan provinsi jambi karena nilai $\text{sig } 0,031 < 0,05$.

Kata Kunci :Tingkat Kemakmuran, Belanja Modal, Efisiensi Kinerja Keuangan

ABSTRACT

Mellyana Adelia, 2022, "Pengaruh Tingkat Kemakmuran Dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Jambi.

Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Palembang. Guided by Pembimbing I Dr. Drs. Sunardi, S.E,M.Si dan Pembimbing II Darmayanti, S.E., M,M

This study basically aims to determine the effect of the level of prosperity and capital expenditure on the efficiency of local government financial performance in the province of South Sumatra and Jambi province. In writing this thesis the author uses secondary data collection techniques. This study uses multiple linear regression analysis techniques and uses the statistical application of SPSS version 22. The results show the linear regression equation $Y = 37.009 - 1.4889X1 + 6.585X2$, that there is no effect of the level of prosperity and capital expenditure simultaneously on the efficiency of local government financial performance. in the province of South Sumatra and Jambi province because in the F test count sig $0.095 > 0.05$, then there is no partial effect of the level of prosperity on the efficiency of local government financial performance in the province of South Sumatra and Jambi province because in the T test the value of sig is $0.500 > 0, 05$, and there is an effect of capital expenditure on the efficiency of the local government's financial performance in the province of South Sumatra and Jambi province because the T sig value of $0.031 < 0.05$.

Keywords: Prosperity Level, Capital Expenditure, Financial Performance Efficiency

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
	MELLYANA ADELIA	222018174	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat daerah dan antardaerah. Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah (seperti pada negara Federal).

Otonomi bersifat nyata karena memerlukan kewenangan menyelenggarakan, tumbuhan, hidup berkembang didaerah. Sedangkan disebut otonomi bersifat bertanggungjawab karena pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan kepada kepala daerah demi pencapaian tujuan otonomi daerah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan

masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata dan hubungan yang serasi dalam Republik.

Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi Wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkeal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan Pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada dikekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangannya bajak laut dari mancanegara terutama dari negeri cina pada awal abad ke-15 berdirilah kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, Kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai kota kerajaan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Ni Made (2016), Karakteristik Pemerintah Daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat membedakan dengan daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Abdul dan Muhammad (2019:163) Efisiensi kinerja merupakan perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya.

Lia (2017), Kemakmuran (*wealth*) adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan kemakmuran daerah dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil kekayaan riil dari masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Fahmi (2018: 142), Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dalam mendukung pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah menyusun anggaran keuangan yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Anggaran dalam Pemerintah Daerah dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang,

barang dan jasa yang mungkin akan terjadi pada tahun anggaran yang berkenaan. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan APBD yang baik harus berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rivai dan Basri dalam Masram (2017:138), Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kinerja yang telah ditentukan dahulu telah disepakati bersama.

Hidayat (2017:82), Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah. Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mengelola rumah tangganya kita harus melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, seperti

yang dicantumkan dalam PP No. 6 tahun 2008 kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Ni Made (2016)* menyatakan bahwa karakteristik pemerintahan daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Dy Ilham (2018)* kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Mulia (2016)* menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Nugroho dan Budiantara (2016)*, menyatakan bahwa tingkat kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Suhadjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah dan membedakannya dengan daerah lain. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Putu (2016)* menyatakan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Rizal (2017)* menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh *Nugroho (2012)* menyatakan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel I.1
Data Tingkat Kemakmuran, Belanja Modal, Efisiensi Kinerja
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
Tahun 2017-2020

NO	Kota /Kabupaten	Tahun	Tingkat Kemakmuran	Belanja Modal	Efisiensi Kinerja
1.	Kab Banyuasin	2017	11,10	11,48	97,97
		2018	11,15	11,43	95,74
		2019	11,30	11,63	98,98
2.	Kota Palembang	2017	12,04	11,93	91,93
		2018	11,98	11,93	100,07
		2019	12,03	12,05	99,51
		2020	12,01	11,95	99,80
3.	Kab Empat Lawang	2017	10,84	11,31	98,55
		2018	10,51	11,40	98,92
		2019	10,62	11,40	99,38
		2020	10,53	11,44	99,95
4.	Kab Lahat	2017	11,06	11,53	99,77
		2018	11,05	11,49	95,70
		2019	11,15	11,60	88,63
		2020	11,11	11,57	102,83
5.	Kab Muara Enim	2017	11,36	11,72	93,68
		2018	11,37	11,75	96,39
		2019	11,48	11,95	97,40
		2020	11,40	11,73	102,10
6.	Kab Musi Banyuasin	2017	11,32	11,84	99,12
		2018	11,32	11,94	97,96
		2019	11,46	12,04	92,52
		2020	11,55	11,90	95,39
7.	Kab Musi Rawas	2017	11,18	11,50	93,18
		2018	11,03	11,56	93,67
		2019	11,11	11,63	97,40
		2020	11,23	11,61	103,98
8.	Kab Musi Rawas Utara	2017	10,76	11,45	97,07
		2018	10,48	11,51	94,00
		2019	10,57	11,60	90,34
		2020	10,68	11,43	104,40

9.	Kab Ogan Ilir	2017	10,98	11,54	99,40
		2018	10,74	11,44	96,97
		2019	10,94	11,51	96,50
		2020	10,94	11,42	105,26
10	Kab Ogan Komering Ilir	2017	11,35	11,68	99,46
		2018	11,37	11,48	86,26
		2019	11,29	11,80	95,85
		2020	11,23	11,78	111,00
11	Kab OKU	2017	11,24	11,53	98,98
		2018	11,19	11,52	100,47
		2019	11,16	11,54	96,27
		2020	11,06	11,39	107,60
12	Kab OKU Selatan	2017	10,95	11,47	99,31
		2018	10,63	11,49	96,85
		2019	10,76	11,58	83,63
		2020	10,67	11,45	99,59
13	Kab OkU Timur	2017	10,89	11,51	80,65
		2018	10,93	11,44	80,00
		2019	11,00	11,71	86,98
		2020	10,98	11,64	95,12
14	Kab Pali	2017	10,76	11,59	96,52
		2018	10,87	11,79	98,61
		2019	10,93	11,88	96,44
		2020	10,69	11,44	100,21
15	Kota Lubuk Linggau	2017	11,06	11,37	96,13
		2018	11,02	11,32	93,08
		2019	11,00	11,41	91,69
		2020	10,94	11,52	99,38
16	Kota Pagaram	2017	10,82	11,29	91,55
		2018	10,87	10,97	85,20
		2019	10,78	11,33	96,36
		2020	10,95	11,40	94,02
17	Kota Prabumulih	2017	11,08	11,21	96,63
		2018	10,96	11,08	86,50
		2019	11,00	11,49	96,37
		2020	10,93	11,34	108,45
18	Kab Batanghari	2017	10,94	11,32	85,30
		2018	10,99	11,17	96,98
		2019	10,96	11,40	69,89
		2020	11,02	11,18	99,96
19	Kab Bungo	2017	11,26	11,19	92,93
		2018	11,13	11,31	85,89
		2019	11,15	11,37	102,74
		2020	11,10	11,19	101,66
20	Kab Kerinci	2017	10,93	11,34	97,83
		2018	10,91	11,28	96,44
		2019	10,93	11,47	79,58

		2020	10,53	11,30	98,61
21	Kab Merangin	2017	10,94	11,48	102,94
		2018	10,95	11,32	98,55
		2019	11,03	11,36	96,05
		2020	11,00	11,44	103,77
22	Kab Muaro Jambi	2017	10,89	11,57	85,18
		2018	10,96	11,47	93,97
		2019	10,97	11,51	85,62
		2020	10,97	11,42	105,15
23	Kab Sarolangun	2017	10,93	12,05	94,00
		2018	11,07	11,39	94,00
		2019	10,98	11,33	90,47
		2020	10,85	11,62	107,63
24	Kab Tanjung Jabung Barat	2017	10,99	11,39	105,74
		2018	11,01	12,13	102,81
		2019	11,08	11,62	98,41
		2020	11,21	12,14	97,27
25	Kab Tanjung Jabung Timur	2017	10,89	11,84	119,86
		2018	10,70	11,55	97,82
		2019	10,73	12,08	100,58
		2020	10,70	11,44	96,87
26	Kab Tebo	2017	10,84	11,50	91,05
		2018	10,88	11,52	99,42
		2019	10,92	11,36	104,06
		2020	10,89	11,37	95,35
27	Kota Jambi	2017	11,60	11,41	95,13
		2018	11,53	11,43	96,76
		2019	11,59	11,15	94,12
		2020	11,55	11,62	99,71
28	Kota Sungai Penuh	2017	10,50	11,65	105,20
		2018	10,53	11,64	97,75
		2019	10,54	11,65	102,83
		2020	10,46	11,24	88,06

Sumber : Badan Pemeriksaan Keuangan

Berdasarkan tabel I.1 diatas terdapat fenomena masalah yang menunjukkan perbandingan antara kota Palembang tahun 2018 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal rendah tetapi efisiensi tinggi 100,07 itu menunjukkan bahwa tidak efisien dibandingkan tahun 2019 kota

palembang tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi 99,51 menunjukkan efisien. Terdapat di kabupaten Lahat tahun 2019 tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah 88,63 menunjukkan bahwa tidak efisien dengan perbandingan kabupaten Lahat tahun 2020 tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi 102,83 sangat berbeda jauh perbandingan antara kabupaten Lahat tahun 2019 dan 2020. Perbandingan yang sangat jauh antara kabupaten Lahat dan kabupaten Muara Enim tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa kabupaten Muara Enim efisien.

Berdasarkan tabel di atas kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah 92,52 menunjukkan bahwa tidak efisien dibandingkan tahun sebelumnya tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa efisien. Selanjutnya kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2017-2020 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien dan dibandingkan kabupaten Musi Rawas tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi itu menunjukkan bahwa efisien. Fenomena selanjutnya bisa dilihat dari tabel kabupaten Ogan Ilir tahun 2017-2020 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien, tetapi tidak dengan kabupaten Ogan Komering Ilir tingkat

kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi dan efisiensi tinggi berarti menunjukkan bahwa efisien nya data tersebut.

Fenomena selanjutnya terdapat data dikabupaten oku selatan tahun 2017-2020 dimana tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien. Perbandingan sangat jauh antara kabupaten oku tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa efisien dari pada kabupaten oku selatan. Dikabupaten oku timur tahun 2019 tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah menunjukkan bahwa efisien menjadi perbandingan ditahun 2017-2018 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah menunjukkan bahwa tidak efisien. Pada kabupaten pali data tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa kabupaten pali tidak efisien dalam tingkat kemakmuran. Kota pagaralam tahun 2017 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal rendah tetapi efisiensi tinggi, dibandingkan tahun 2018 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal rendah tetapi efisiensi rendah menunjukkan tidak efisien.

Dari tabel I.1 provinsi jambi terdapat fenomena dikabupaten kabupaten batanghari tahun 2017 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah 85,30 menunjukkan bahwa tidak efisiensi, tahun 2019 sama mengenai tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah menunjukkan bahwa tidak efisien. Selanjutnya kabupaten kerinci tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi

tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien. Dibandingkan antara kabupaten bungo tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi berarti menunjukkan bahwa efisien. Kabupaten merangin tahun 2017-2018 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien dibandingkan tahun 2019-2020 tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa efisien. Fenomena selanjutnya kabupaten muaro jambi tahun 2020 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien, dibandingkan tahun sebelumnya tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi rendah.

Kabupaten tanjung jabung barat tahun 2017 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien dibandingkan tahun selanjutnya tingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa semakin efisien. Kabupaten tanjung jabung timur tahun 2019 tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien dari pada tahun selanjutnya semakin efisien ditingkat kemakmuran tinggi dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi. Dari data kabupaten tebo tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran rendah dan belanja modal tinggi tetapi efisiensi tinggi artinya tidak efisien. Dan selanjutnya kota sungai penuh tingkat kemakmuran rendah dan belanja

modal tinggi tetapi efisiensi tinggi menunjukkan bahwa tidak efisien dari data tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kemakmuran dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Kemakmuran Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah Pengaruh Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji Pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.
2. Menguji Pengaruh Belanja Modal terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang Pengaruh Tingkat Kemakmuran dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Jambi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pengaruh tingkat kemakmuran dan belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagai informasi dan dokumentasi data penelitian yang dapat dijadikan referensi perpustakaan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 18. Medan
- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017, Agustus). Pengaruh PAD, DAU, Silpa, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1-18.
- Bastian, I. (2009). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariance dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (2021), *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Ginting, R. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM Fekom*, 4(2), 4543-4557.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 1.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Henny (2018), Pengaruh Karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan diseluruh provinsi indonesia
- Julitawati, Ebit., Darwanis, & Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, Volume 1, No 1. Agustus Tahun 2012.
- Junaedy. (n.d.). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Manajemen dan Akuntansi*.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFKusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret* : Surakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFEMustikarini,
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2017, September). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. *Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220.
- Meli (2018), Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Ni Made Suryaningsi dan Eka (2016), Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 Tentang SAP 69

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. 2005. PSAP Nomor 2, Paragraf 7. Tentang Belanja Daerah.

_____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. 2006. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah.

_____. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

_____. 2008. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah

_____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan

_____. 2010. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

_____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Tentang Klasifikasi Belanja Daerah.

_____. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pratama, Kadek Aris Dwi., Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No.1 Tahun 2015.

Rahmawaty, Rafika Aulia (2017), Pengaruh Kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ratnasari, Ayu D. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Temuan Audit

Ristu Pratiwi dan Yani (2016), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, kepala daerah dan tindak lanjut temuan audit

Santoso, Singgih. (2000). Buku Latihan Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Solikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. Analisis Akuntansi, 3(4), 553-562.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 183-191.

Siregar, Baldric. (2017), Akuntansi Sektor Publik (*akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual*)

Saleh, Choirul.(2020), Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business : “Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Setyaningrum, Dyah & Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9, No.2 Tahun 2012.

Suhardjanto, Djoko & Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8, No.1 Tahun 2011.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, Volume 1, No.1 Tahun 2012.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah daerah

Waliyyani, Ghaniyyu Mintotik & Amir Mahmud. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Volume 4, No.2 Tahun 2015.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).

Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76.

Widya Astuti & Debby Fitriyani. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin*.

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.jateng.bps.go.id